

Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Infrastruktur dan Kesejahteraan Sosial di Desa

Tino Supriantino,¹ Wahyu,² Tardi Setiabudi,³

^{1,3} Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

² Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
Email: tino.supriantino@gmail.com¹, bilalwahyu862@gmail.com², tardybody@gmail.com³

Abstract: *This study investigates the impact of the Village Fund Program on the improvement of social welfare and village infrastructure. The challenges faced in the management of the Village Fund, such as transparency and community participation. To demonstrate that Village Funds can improve the quality of life for the community through infrastructure development and economic empowerment, the literature review collects data from various relevant sources. The research results show that the allocation of Village Funds improves infrastructure, such as roads and public facilities, and enhances access to basic services for the community. Village Fund also has a positive impact on the economic, social, and health aspects of the village community. This research found that the Village Fund program heavily relies on good management, active community participation, and support from the local government. Therefore, it is necessary to enhance transparency, accountability, and training for village officials to maximize the benefits that the community can obtain from the Village Fund.*

Key Words: *Village funds, infrastructure, social welfare, management, and community involvement*

Latar Belakang

Di Indonesia, program Dana Desa adalah inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat desa untuk membangun infrastruktur, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan mengakhiri kemiskinan. Dana Desa memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan, menurut penelitian, tetapi efektivitasnya bervariasi tergantung pada pengelolaan dan pelaksanaan di setiap desa (Gaspersz, 2023).

Namun masalah pengelolaan Dana Desa masih ada. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini et al., 2019), meskipun Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Secara keseluruhan, terdapat potensi besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa melalui program Dana Desa di Indonesia. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Dana Desa dapat mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Sebuah penelitian oleh Hidayah dan Mukhlis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program padat karya yang didanai oleh Dana Desa dapat meningkatkan akses terhadap sanitasi dan air bersih, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi informal yang tinggi (Hidayah & Mukhlis, 2019).

Selain itu, menurut (Jamaluddin et al., 2018), pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dapat mengurangi manfaat pembangunan. Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan bahwa program yang didanai oleh Dana Desa sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang lebih luas.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dana Desa membantu meningkatkan perekonomian lokal. Studi menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang baik dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan memberdayakan



masyarakat (Firmansyah et al., 2020). Namun masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masih menjadi masalah yang perlu diatasi (Sidik, 2015). Oleh karena itu, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien untuk kepentingan bersama, menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan jika digunakan dengan benar.

Tujuan utama program Dana Desa di Indonesia adalah peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Memperbaiki infrastruktur dasar desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya adalah tujuan utama dari Dana Desa. Studi oleh Azhari dan Suhartini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan baik; sebagian besar dana dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 (Azhari & Suhartini, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat. Selain menegaskan bahwa dengan pengelolaan Dana Desa yang efektif, masyarakat desa dapat memperoleh peningkatan kualitas hidup mereka (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).

Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, peningkatan ekonomi lokal dapat dicapai melalui dukungan program Dana Desa untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun masalah pengelolaan Dana Desa masih ada. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah mencakup dana, yang dapat menghambat tercapainya tujuan program (Fathur Rauzi Sukarno, 2022). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Di Indonesia, program Dana Desa telah menjadi alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur. Namun, berbagai masalah yang berkaitan sering membuat program ini dibahas. Dana Desa juga memainkan peran penting dalam memperkuat masyarakat. Menurut (Nomaini et al., 2021), sosialisasi dan manajemen penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menjamin bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi desa (Ismail & Hapsoro, 2023). Badan Usaha Milik Desa dapat menurunkan angka kemiskinan di desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Secara keseluruhan, Dana Desa sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat. Transparansi pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa adalah beberapa masalah utama terkait program keefektifan Dana Desa. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak percaya pada pemerintah desa dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam program

Ketidaktepatan tentang bagaimana Dana Desa dikelola merupakan salah satu masalah yang paling signifikan. Menurut penelitian pengelolaan dana desa seringkali

tidak transparan dan masyarakat desa tidak terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan permulaan (Hulu et al., 2018). Partisipasi masyarakat adalah masalah tambahan yang berkaitan dengan seberapa efektif Dana Desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Jamaluddin et al., 2018), pengelolaan Dana Desa seringkali tidak sesuai dengan tujuan dan digunakan dengan buruk. Selain itu, pengelolaan dana desa tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada transparansi yang jelas, dan masyarakat tidak dapat melihat bagaimana dana tersebut digunakan (Alianur, 2022).

Jika masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, hal itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan bagaimana dana digunakan. Akibatnya, dampak positif dari program tersebut akan berkurang. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas Dana Desa. Pelatihan dan pengembangan harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan kapasitas manajemen dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Malik, 2023). Tidak mungkin mengelola Dana Desa secara efektif, yang berdampak pada hasil yang diharapkan dari program.

Menurut penelitian (Sulistiyorini, 2023), program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena masyarakat penerima belum memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan dana tersebut, ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas mempengaruhi kinerja Dana Desa. Penelitian (Sutikno, 2021) menekankan pentingnya membuat kebijakan pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari doktrin dana. Tanpa pengawasan yang baik, ada kemungkinan peningkatan mengacu pada dana, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa. Meskipun Dana Desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat, transparansi, partisipasi masyarakat, kapasitas SDM, dan pengawasan adalah masalah yang harus diselesaikan agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Tinjauan Pustaka

Teori Pembangunan

Pembangunan desa, yang berkaitan dengan program Dana Desa, adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial, dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan (Pratama et al., 2023)

Konsep dasar ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Salah satu alat yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan desa adalah Program Dana Desa. Tujuan dari dana yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut penelitian (Hulu et al., 2018) pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanggilingo telah meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, yang mencakup pengembangan kapasitas masyarakat dan pelatihan. Oleh karena itu, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat yang mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Untuk mencapai tujuan

pembangunan yang diinginkan, penting membuat rencana yang tepat bagi penggunaan Dana Desa.

Model Pembangunan Desa yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Metode ini berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk memilih dan menilai program pembangunan pada saat dirancang, dijalankan, dan dievaluasi. Dalam model ini, *Participatory Rural Appraisal (PRA)* adalah salah satu metode yang paling umum digunakan karena memungkinkan masyarakat untuk menemukan masalah dan menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya (Peningkatan Peranan Desa dalam Perluasan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, 2023).

Model pembangunan partisipatif memungkinkan pemerintah desa untuk menjadi lebih baik dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RPJMDes yang efektif terhambat oleh kurangnya data dan pemahaman tentang manajemen keuangan desa (Sujana et al., 2020). Oleh karena itu, sangat penting bagi perangkat desa untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan dan mengelola Dana Desa dengan baik. Secara keseluruhan, model pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat meningkatkan kohesi sosial dan kemandirian masyarakat serta meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, program-program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

Pembangunan desa yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif. Salah satu alat penting untuk pembangunan desa adalah Program Dana Desa, yang harus dikelola dengan baik dan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian desa.

Tujuan Program Dana Desa dan Implementasi

Sejarah dan Dasar Hukum Dana Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dana desa secara mandiri. Melalui pembagian dana dari pemerintah pusat, undang-undang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengatur pengelolaan dan akuntabilitas bagaimana dana digunakan untuk tujuan penting seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur (Meidina et al., 2022). Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan dapat dilakukan secara efisien dan akuntabel jika ada dasar hukum yang jelas.

1. Struktur Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa

Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat berpartisipasi dalam struktur pengelolaan Dana Desa. Penggunaan dana harus direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Di sisi lain, BPD berfungsi sebagai pengatur dan mediator antara masyarakat dan pemerintah desa (Akbar, 2018). Rumus yang menghitung jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan di setiap desa digunakan untuk menentukan bagaimana Dana Desa akan didistribusikan. Selain itu, sumber pendapatan asli desa dan transfer dari pemerintah daerah yang diberikan kepada desa, sehingga menambah total dana yang tersedia untuk pembangunan (Anggara, 2021). Diharapkan Dana Desa dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan struktur pengelolaan yang jelas dan partisipasi masyarakat yang aktif.

2. Hasil dari evaluasi

Dana Desa di berbagai daerah menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian di Kabupaten Pasaman Barat, pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan (Pratama et al., 2023). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa pengawasan publik atas pengelolaan Dana Desa perlu ditingkatkan untuk menghindari perlindungan dan memastikan akuntabilitas (Wibisono, 2017). Selain itu, telah menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah efektif di beberapa desa, namun masih sulit untuk mencapai tingkat efisiensi terbaik. Ini bahwa, Dana Desa memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Secara keseluruhan.

Dana Desa adalah program yang memiliki sejarah panjang dan dasar hukum yang kuat, serta memiliki struktur pengelolaan yang terdiri dari berbagai pihak yang berbeda. Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Dana Desa di berbagai wilayah menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah tercapai, masih ada tantangan yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

3. Kesejahteraan Sosial dan Infrastruktur Desa

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, infrastruktur desa, yang mencakup jalan, jembatan, dan fasilitas umum, sangat penting. Infrastruktur yang baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempermudah aksesibilitas. Mengoptimalkan pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dapat mempercepat pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas layanan publik (Mustofa, 2023).

Dengan infrastruktur yang memadai, orang lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Semua ini meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat adalah beberapa indikator kesejahteraan sosial. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang kemampuan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menurut penelitian (Sibarani, 2024), pembangunan sosial yang baik, yang mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal pendidikan, pendidikan yang baik memiliki kemampuan untuk mengubah status sosial dan ekonomi suatu masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan keluarga (Eha, 2024). Di sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan usaha dan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, kesejahteraan sosial bergantung pada infrastruktur desa yang baik. Jalan yang baik, jembatan yang aman, dan fasilitas umum yang memadai memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan penting yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat saat merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur agar kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi (Putra, 2023).

Penelitian Terkait

Banyak ilmuwan dan peneliti yang berkonsentrasi pada penelitian tentang hubungan antara Dana Desa, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Studi menunjukkan bahwa dengan pembagian Dana Desa yang tepat, mereka dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dengan membangun infrastruktur. Studi ini melihat bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Dana Desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Dengan menggunakan metode analisis kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa BUMDesa dapat meningkatkan kesejahteraan secara signifikan jika dana desa dikelola dengan baik (Fitriani et al., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian (Nurohman et al., 2019) yang menemukan bahwa Dana Desa meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Wisata Menggoro. Penelitian tersebut menekankan bahwa pengelolaan yang baik adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain pengaruh penyaluran Dana Desa terhadap indikator perekonomian di wilayah tertinggal, telah ditunjukkan bahwa penyaluran Dana Desa meningkatkan perekonomian lokal, yang pada pasangannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otheliansyah & Yasni, 2021). Menurut penelitian (Nurhidayati, 2023), Dana Desa berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dengan membangun infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan aparatur desa.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan tentang pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Metode ini akan berkonsentrasi pada elemen penting seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efisiensi pengelolaan dana desa.

1. Identifikasi Sumber Literatur: Kajian ini akan menggunakan jurnal, buku, dan dokumen resmi tentang pengelolaan Dana Desa. Penelitian oleh Rahayu et al. yang membahas cara mencegah kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah salah satu referensi yang relevan.
2. Pengumpulan Data: Data akan dikumpulkan dengan mencari artikel yang relevan di perpustakaan digital dan database akademik. Studi sebelumnya yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif akan menjadi fokus utama. Misalnya, penelitian melihat penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pasan (Mautang et al., 2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dan Basuki yang melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Asmawati & Basuki, 2019).
3. Analisis dan Sintesis: Menganalisis dan mensintesis data diperlukan setelah mengumpulkan literatur. Dalam analisis ini, tema-tema utama yang muncul dari literatur akan diidentifikasi. Tema-tema ini termasuk masalah dalam mengelola Dana Desa, komponen yang mempengaruhi efektivitas, dan peran partisipasi masyarakat. Sumber informasi tambahan akan diberikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hulu et al. tentang cara Dana Desa mendorong pemberdayaan masyarakat desa (Hulu et al., 2018).
4. Evaluasi Kualitas Sumber: Setiap sumber yang digunakan dalam penelitian ini akan dievaluasi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang menggunakan metode analisis yang kuat menyelidiki pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (Nursin et al., 2022).
5. Kesimpulan dan Saran: Tinjauan ini akan mencakup penelitian oleh Mustofa yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur (Mustofa, 2023). Rekomendasi ini akan didasarkan pada penelitian literatur yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus lebih akuntabel dan terbuka, dan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses

pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

Pembahasan

Desa yang diteliti memiliki sekitar 3.000 orang yang memiliki berbagai atribut sosial-ekonomi. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, dan usaha kecil dan menengah (UKM) adalah pekerjaan sisa. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang beragam, tetapi sebagian besar orang menerima pendidikan dasar dan menengah. Desa ini masih memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang rendah, dengan 20% orang miskin.

Dana desa dari APBN diberikan kepada desa untuk berbagai tujuan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Laporan tentang penggunaan Dana Desa menunjukkan bahwa sekitar 60 (enam puluh) persen dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum, sisanya adalah bantuan langsung tunai dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, transparansi dan akuntabilitas terus menjadi masalah dalam pengelolaan dana ini, yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pengaruh Dana Desa pada Perbaikan Infrastruktur

Infrastruktur desa telah ditingkatkan secara signifikan melalui Program Dana Desa. Sebelumnya adanya dana desa, kondisi jalan desa sangat memprihatinkan banyak jalan yang rusak dan sulit dilalui. Setelah Dana Desa didistribusikan, jalan baru dan perbaikan telah meningkatkan akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Kehidupan masyarakat mendapat manfaat dari peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat dapat mendapatkan perawatan medis lebih cepat melalui jalan yang lebih baik. Selain itu, petani dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjual produk pertanian.

Dana Desa dan Kesejahteraan Sosial

Dari perspektif ekonomi, program ini telah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru dan memperluas usaha kecil. Menurut penelitian, tiga puluh persen orang dalam masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi mengalami peningkatan pendapatan. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga meningkat, yang menghasilkan lebih banyak siswa yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih banyak fasilitas kesehatan yang tersedia di desa. Secara keseluruhan, masyarakat desa telah memperbaiki kualitas hidup mereka sebagai hasil dari program Dana Desa. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan akses terhadap layanan dasar, yang berdampak pada pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

Salah satu faktor yang memastikan bahwa Dana Desa berhasil digunakan di desa ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendampingan dan pelatihan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan Dana Desa meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan. Namun terdapat beberapa kendala yang menghalangi program Dana Desa, salah satunya adalah ketidakjelasan tentang bagaimana dana digunakan, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa desa dengan populasi sekitar 3.000 orang menghadapi masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi yang signifikan, menurut hasil diskusi. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk hanya dasar dan menengah, yang berkontribusi pada tingkat kesejahteraan sosial yang rendah, dengan 20% dari populasi hidup dalam kondisi miskin. Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat mempengaruhi perkembangan infrastruktur desa. Sekitar 60% dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum. Sisanya dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan bantuan langsung. Meskipun demikian, ada banyak masalah dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Perbaikan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa telah membawa perubahan positif dalam aksesibilitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sebelum ada dana desa, kondisi jalan yang buruk menghalangi orang untuk pindah, tetapi setelah diperbaiki, akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan meningkat. Selain mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, hal ini memungkinkan petani menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual produk pertanian yang lebih produktif. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, program Dana Desa telah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru dan memperluas UKM. Keberhasilan penggunaan Dana Desa di desa ini didukung oleh partisipasi masyarakat yang aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta bantuan dari pemerintah daerah dalam bentuk pendampingan dan pelatihan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang cara Dana Desa digunakan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas program yang dilaksanakan. Namun, ada hambatan yang menghambat program, terutama ketidakjelasan tentang cara dana digunakan, yang dapat membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah desa.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa program Dana Desa telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur, akses ke layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi. Tetapi untuk mencapai hasil yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana harus ditingkatkan, dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan di setiap langkah program. Program ini sangat bergantung pada kerja sama pemerintah desa dan masyarakat serta komitmen untuk melakukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Akbar, D. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Add) (Penelitian Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2). <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958>
- Alianur, M. (2022). Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kawasan Wisata Bur Telege Di Kabupaten Aceh Tengah. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3), 161–170. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1178>
- Anggara, A. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 377–387.

- <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.200>
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 354–362. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1830>
- Eha, J. L. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Indikator Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. *JGS*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.69606/geography.v2i1.82>
- Fathur Rauzi Sukarno, K. A. (2022). Tata Kelola Dana Desa Agar Terhindar Dari Tindak Pidana Korupsi Bagi Perangkat Desa Di Desa Sekotong Barat. *Komunita*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.60004/komunita.v1i2.22>
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi). *Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.32493/jabi.v3i2.y2020.p168-181>
- Fitriani, F., Semmaila, B., & Lamo, M. (2020). Pengaruh BUMDesa Dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bulukumba. *Paradoks Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 57–70. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i3.490>
- Gaspersz, P. (2023). Linking Public Service Availability to Village Welfare. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(2), 136–158. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i2.455>
- Hidayah, I., & Mukhlis, I. (2019). *Dana Desa on Clean Water and Sanitation Access in Indonesia: Does Cash-for-Work (Pkt) Matter?* <https://doi.org/10.20472/efc.2019.012.008>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2023). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ajaran Bung Karno Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (Jpmsipo)*, 1(2), 40–47. <https://doi.org/10.58965/jpmsipo.v1i2.9>
- Isnaini, I., Rustiana, D., Aini, E. N., & Luthfi, A. (2019). *Obstacles and Opportunities of Community Based Dana Desa Management (Case Study: Kalisidi Village, West Subdistrict Ungaran, Semarang Regency)*. <https://doi.org/10.2991/icorsia-18.2019.41>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Jppuma Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Malik, E. (2023). Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bumdes. *Sabangka*, 2(02), 329–333. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i02.553>
- Mautang, D. D., Koleangan, R. A., & Kawung, G. M. (2019). Analisis Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8).

- <https://doi.org/10.35794/jpekd.23430.19.8.2018>
- Meidina, A. S., Nuraina, E., & Astuti, E. (2022). Akuntabilitas Dana Desa Dalam Perspektif Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 9(02), 170–180. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.14>
- Mustofa, A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>
- Nomaini, F., Saraswati, E., & Effendi, S. (2021). Sosialisasi Manajemen Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 4(2), 258–266. <https://doi.org/10.30591/japhb.v4i2.2269>
- Nurhidayati. (2023). Determinan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Sewindu Dana Desa. *Akurasi Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 139–156. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.349>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Magisma Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.38>
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>
- Otheliansyah, G., & Yasni, R. (2021). Pengaruh Penyaluran Dana Desa Pada Indikator Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 57–74. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.267>
- Pratama, A. H. S., Dewantara, A., & Dewi, A. R. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Program Desa Tematik Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 4(1), 70–80. <https://doi.org/10.26905/jrei.v4i1.10012>
- Putra, K. W. (2023). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (Jglp)*, 5(2), 245–253. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.958>
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Sibarani, D. B. N. (2024). Pembangunan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. *JCS*, 3(4), 898–907. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i4.681>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jkap (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sujana, E., Suci, N. M., Yasa, I. N. P., & Dewi, N. A. W. T. (2020). PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA WANAGIRI MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RPJMDes DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA. *Bernas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 531–542. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521>
- Sulistiyorini, W. (2023). Peran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pilangkenceng Kecamatan

- Pilangkenceng Kabupaten Madiun. *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 11(1), 103. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v11i1.15031>
- Sutikno, C. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/10.56681/da.v17i2.24>
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>